

PERAN STAKEHOLDER DALAM MENGATASI KETIMPANGAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL : TANTANGAN DAN SOLUSI

Fitria Sari¹, Erwin Salpa Riansi²

^{1,2}FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹Ffy.fify12@gmail.com, ²salpariansierwin@untirta.ac.id

ABSTRACT

Education is an important pillar in a country's development, but educational inequality in remote areas of Indonesia is a serious challenge. This article explores the role of stakeholders—the government, educational institutions, communities and the private sector—in addressing these inequalities. Stakeholders have a responsibility to improve access and quality of education, especially in isolated areas. The government plays a role in formulating policies and providing education infrastructure, while education institutions are required to adapt the curriculum to be relevant to local needs. Community organizations and NGOs serve as a bridge between the government and the community, providing non-formal education and identifying specific challenges. The private sector, through corporate social responsibility (CSR) programs, can provide financial support and construction of education facilities. The article also discusses the challenges faced, including limited infrastructure, a shortage of qualified teaching staff, and social and economic issues that hinder educational participation. Various solutions are proposed, such as increasing scholarships, providing transportation, and using technology in education. Through collaboration between all stakeholders, it is hoped that access to and quality of education in remote areas can improve, creating more equitable opportunities for all children. This conclusion emphasizes the importance of integrated efforts in addressing education inequality to support sustainable development in Indonesia.

Keywords: stakeholder role, educational inequality, remote area education

ABSTRAK

Pendidikan merupakan pilar penting dalam pembangunan suatu negara, namun ketimpangan pendidikan di daerah terpencil di Indonesia menjadi tantangan serius. Artikel ini mengeksplorasi peran stakeholder—pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta—dalam mengatasi ketimpangan tersebut. Stakeholder memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di wilayah yang terisolasi. Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan infrastruktur pendidikan, sementara lembaga pendidikan dituntut untuk mengadaptasi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal. Organisasi masyarakat dan LSM berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan komunitas, menyediakan pendidikan non-formal dan mengidentifikasi tantangan spesifik. Sektor swasta, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dapat memberikan dukungan finansial dan pembangunan fasilitas pendidikan. Artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga pengajar berkualitas, serta masalah sosial dan ekonomi yang menghambat partisipasi

pendidikan. Berbagai solusi diusulkan, seperti peningkatan beasiswa, penyediaan transportasi, dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Melalui kolaborasi antara semua stakeholder, diharapkan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil dapat meningkat, sehingga menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi semua anak. Kesimpulan ini menekankan pentingnya upaya terintegrasi dalam mengatasi ketimpangan pendidikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: peran stakholder, ketimpangan pendidikan, pendidikan daerah terpencil

A. Pendahuluan

Salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara adalah pendidikan, yang berfokus pada proses pengajaran serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapainya, banyak pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan langsung dengan sektor pendidikan harus berperan aktif. *Stakeholder* dalam pendidikan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap proses dan hasil pendidikan, seperti pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dunia usaha, dan siswa itu sendiri.

Pada bagian ini jelaskanlah bagian dasar dari artikel yang ditulis, yang mencakup uraian singkat tentang latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang didalamnya mencakup mendeskripsikan fenomena permasalahan yang diamati, kondisi nyata yang diperoleh

yang dapat ditunjang dengan beberapa teori. Bagian selanjutnya dapat dipaparkan data-data ataupun fakta-fakta yang mendukung penelitian maupun gagasan pemikiran. Kemudian dapat dipaparkan fokus permasalahan dan tujuan dilakukannya penelitian.

Dalam konteks pendidikan, pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau peran dalam proses pendidikan disebut sebagai *stakeholder*. Secara umum, kata "*stakeholder*" mengacu pada individu atau kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan dan penyelenggaraannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Stakeholder* pendidikan dapat dibagi menjadi berbagai kelompok. Masing-masing dari kelompok ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. Pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan

organisasi non-pemerintah (NGO) merupakan *stakeholder* pendidikan yang mempunyai peranan masing – masing.

Pemerintah berperan penting dalam penyediaan pendidikan dengan merumuskan kebijakan, peraturan, dan sumber daya keuangan untuk mendukung sektor pendidikan. Merupakan hak prerogatif pemerintah untuk menetapkan kebijakan pendidikan yang menjamin akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas bagi semua individu, dengan penekanan pada anak-anak. Baik entitas pemerintah pusat dan lokal berkolaborasi untuk memfasilitasi peluang beasiswa, mendirikan lembaga pendidikan di daerah yang kurang terlayani, dan mengembangkan inisiatif pendidikan inklusif (Gogiashvili, 2022). Alokasi anggaran negara oleh pemerintah pusat pun sangat penting dalam memastikan dukungan keuangan yang memadai untuk pendidikan, yang kemudian disebarluaskan ke berbagai daerah dan lembaga pendidikan. Selain itu, peningkatan sumber daya dan infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan fasilitas sekolah, pengadaan peralatan pendidikan, dan penyediaan

teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran digital, memerlukan investasi finansial yang besar. Investasi semacam itu memungkinkan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang meliputi pengembangan kurikulum adaptif. Untuk memotivasi anak-anak berbakat dalam yurisdiksi mereka untuk mengejar pendidikan tinggi, pemerintah daerah juga dapat menerapkan program beasiswa tambahan yang menciptakan jalur bagi siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung untuk mengakses pendidikan berkualitas tinggi dan mewujudkan aspirasi mereka (Irianto et al., 2024).

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi lanskap pendidikan di Indonesia adalah keberadaan banyak daerah yang terus bergulat dengan kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, disebabkan oleh jarak yang cukup jauh dari lembaga pendidikan, infrastruktur yang tidak memadai, dan kekurangan pendidik yang mahir. Akibatnya, pendirian sekolah di daerah terpencil merupakan inisiatif kritis yang bertujuan memfasilitasi distribusi peluang pendidikan yang lebih adil. Selain itu, pengembangan

fasilitas pendidikan di daerah terpencil ini mencakup penyediaan fasilitas penting seperti konektivitas internet, perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas yang lengkap. Di lokasi tertentu, lembaga yang memanfaatkan teknologi telah didirikan, memungkinkan siswa untuk mengakses materi pendidikan online dan berpartisipasi dalam inisiatif pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, pembentukan rute transportasi yang aman bagi siswa merupakan elemen penting dari program pendidikan di daerah-daerah yang kurang terlayani ini (Sari et al., 2024).

Dalam hubungannya dengan entitas pemerintah dan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat (organisasi non-pemerintah), secara signifikan menambah lanskap pendidikan. Seringkali, organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai fasilitator, menjembatani kesenjangan antara komunitas dan kerangka kerja pemerintah atau pendidikan. Mereka memiliki pemahaman yang lebih bernuansa tentang kebutuhan masyarakat dan mahir mengidentifikasi tantangan pendidikan di daerah tertentu. Banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM)

berusaha untuk memberikan kesempatan pendidikan non-formal, menanamkan keterampilan hidup yang penting, dan meningkatkan akses ke pendidikan di daerah yang terisolasi secara geografis. Kolaborasi antara sektor pendidikan dan domain industri sangat penting untuk pengembangan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, mengingat bahwa bidang bisnis dan industri memainkan peran penting dalam menumbuhkan tenaga kerja yang mahir yang siap untuk terlibat dalam persaingan global. Dengan mengintegrasikan perspektif sektor bisnis, pengejaran pendidikan tidak hanya menekankan pengetahuan teoritis tetapi juga peningkatan kompetensi yang dapat diterapkan dalam lingkungan profesional (Nurhakim & Ningsih, 2022)..

Ketimpangan Pendidikan di Daerah Terpencil

Ketimpangan pendidikan di daerah-daerah terpencil di Indonesia tetap menjadi tantangan yang signifikan. Anak-anak di daerah terpencil ini sering tertinggal secara akademis karena keterbatasan akses ke lembaga pendidikan, tenaga pengajar

dan sumber daya yang tidak memadai, serta kekurangan alat teknologi. Selain itu, kondisi geografis yang menantang sering kali menghadirkan hambatan yang cukup besar bagi anak-anak di daerah ini untuk bersekolah secara konsisten (Divya et al., 2024). Ketidakadilan ini semakin mengintensifkan kesenjangan pendidikan antara populasi perkotaan dan pedesaan. Anak-anak yang tinggal di lokasi terpencil sering diminta untuk melintasi jarak yang jauh, kadang-kadang menavigasi lanskap yang sulit, untuk mencapai sekolah mereka. Hal ini tidak hanya menghalangi mereka untuk bertahan dalam pengejaran pendidikan mereka tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya angka putus sekolah di wilayah tersebut (Chand & Mohan, 2019). Meningkatkan kualitas guru, mendistribusikan sumber daya pendidikan secara adil, dan memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses ke area yang sulit dijangkau ini merupakan solusi rumit untuk mengatasi masalah beragam ini (Hu, 2023).

Banyak faktor yang saling berhubungan berkontribusi terhadap fenomena ketidaksetaraan pendidikan

di Indonesia. Yang menonjol di antara faktor-faktor ini adalah kesenjangan geografis dan infrastruktur yang tidak memadai, terutama di daerah terpencil. Di banyak daerah, siswa menghadapi hambatan signifikan untuk kehadiran di sekolah karena akses jalan yang tidak memadai, biaya transportasi selangit, atau kondisi lingkungan yang merugikan (Muttaqin, 2018). Selain itu pendidik yang ditempatkan di daerah terpencil mungkin memiliki pengalaman terbatas atau menunjukkan kurangnya minat untuk melayani di daerah yang ditandai dengan sumber daya pendidikan di bawah standar. Tantangan-tantangan ini semakin diintensifkan oleh tidak adanya fasilitas pendidikan penting, termasuk laboratorium, ruang kelas, dan materi instruksional (Chand & Mohan, 2019).

Elemen lain yang berkontribusi adalah keterbelakangan ekonomi yang berdampak buruk pada kapasitas individu untuk memperoleh pendidikan. Rumah tangga dengan sarana keuangan terbatas sering menghadapi hambatan yang signifikan dalam mendanai kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, terutama mengenai hal-hal penting

seperti seragam, buku teks, dan biaya transportasi (Yasin, M., Rawi, A., & Nurminah, 2024). Perspektif atau norma sosial tertentu seringkali menghambat partisipasi pendidikan, terutama bagi perempuan. Sebagai contoh, ada pandangan yang menganggap pendidikan tidak begitu penting, karena anak-anak lebih diharapkan membantu pekerjaan rumah tangga diskriminasi gender dalam pendidikan, dipengaruhi oleh faktor keuangan dan budaya, secara signifikan membatasi akses perempuan ke pendidikan tinggi. Pandangan patriarki dan kendala ekonomi sering mengarahkan keluarga untuk memprioritaskan pendidikan anak laki-laki, melanggengkan siklus ketidaksetaraan dan mengurangi peluang bagi anak perempuan (Sugitanata, 2023)

Di Indonesia, hasil pendidikan yang tidak memadai berdampak serius, baik langsung maupun jangka panjang. Banyak orang kehilangan kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka akibat distribusi pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil dan di kalangan kelompok terpinggirkan.

Sistem pendidikan yang adil sangat penting untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan kompetitif. Selain itu, ketimpangan pendidikan memengaruhi kesempatan kerja. Mereka yang tinggal di daerah yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang cukup cenderung memiliki keterampilan yang terbatas, yang berarti mereka hanya dapat menemukan pekerjaan dengan gaji yang rendah dan dengan keterampilan yang kurang. Ini meningkatkan perbedaan sosial dan ekonomi antara yang terdidik dan yang tidak terdidik. Di sisi lain, orang-orang dengan pendidikan yang lebih tinggi atau lebih baik memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih besar. Orang yang tidak berpendidikan sering terjebak dalam pekerjaan dengan gaji rendah, sementara orang yang berpendidikan tinggi terus lebih kaya (Dong, 2024).

Dalam hal pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kualitas hidup secara umum, daerah yang kurang memiliki akses ke pendidikan cenderung tertinggal. Akses pendidikan yang buruk dapat memperburuk kemiskinan di suatu daerah karena masyarakatnya tidak

memiliki keterampilan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Sebaliknya, daerah dengan akses pendidikan yang lebih baik akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi, menjadi lebih kompetitif, dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional. Ini menyebabkan perbedaan lebih besar dalam kesejahteraan dan pembangunan ekonomi antara daerah. Dalam konteks pembangunan nasional, hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena sumber daya manusia yang tidak terampil akan membatasi produktivitas dan inovasi, yang merupakan pendorong utama kemajuan ekonomi (Chen, 2024).

Stakeholder yang terlibat dalam masalah ini, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta, berperan penting untuk mengatasi ketimpangan ini. Semua orang bertanggung jawab untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Namun, banyak masalah yang harus dihadapi untuk mencapainya, mulai dari masalah infrastruktur dan sumber daya manusia hingga perbedaan budaya yang dapat membatasi

partisipasi siswa dalam pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran yang dimainkan oleh berbagai pihak berwenang dalam mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah terpencil, bagaimana tantangan dan solusi yang dapat dilakukan oleh para *stakeholder* untuk mengatasi ketimpangan dan hambatan yang terjadi.

B. Metode Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang dianggap perlu untuk memperkuat naskah yang dipublikasikan. Artikel ilmiah ini menggunakan penelitian perpustakaan sebagai pendekatan metodologisnya, yang memerlukan penyelidikan sistematis dan analisis kritis sumber informasi yang ditemukan dalam materi sastra atau perpustakaan yang berkaitan dengan materi pelajaran yang sedang diperiksa (Sugiyono, 2019). Kerangka metodologis ini mengharuskan pencarian, pengumpulan, dan tinjauan cermat literatur yang sudah ada sebelumnya, meliputi buku, jurnal ilmiah peer-review, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber

relevan lainnya yang terletak di perpustakaan atau dapat diakses secara elektronik melalui database atau internet (Hart, 1998). Dalam konteks studi perpustakaan, peneliti akan menggambarkan topik penelitian spesifik yang ingin mereka jelajahi, kemudian memperoleh literatur yang relevan dengan subjek tertentu. Setelah itu, literatur yang diidentifikasi akan menjalani pemeriksaan sistematis untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang sedang diselidiki (Bowen, 2009). Proses membaca, meneliti, menyimpulkan, membandingkan, dan menyusun data dapat merupakan komponen integral dari pengumpulan literatur dan proses analitis. Upaya penelitian mencakup beberapa langkah berurutan: awalnya, menemukan dan mengumpulkan penelitian sebelumnya terkait dengan standar sarana dan infrastruktur; selanjutnya, terlibat dalam pembacaan menyeluruh dan pemeriksaan temuan yang berasal dari penelitian tersebut; dan akhirnya, melakukan analisis kritis dan evaluasi temuan signifikan dari studi sebelumnya mengenai standar sarana dan infrastruktur. Pada akhirnya, hasil analisis dikemukakan dalam

kesimpulan komprehensif yang mencerminkan hasil penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Peran Stakeholder dalam Mengatasi Ketimpangan

Pemerintah: Kebijakan dan Program

Tantangan besar bagi upaya pemerataan pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan pendidikan di daerah terpencil. Pendidikan di daerah terpencil seringkali kurang efektif karena keterbatasan sumber daya manusia, jarak yang jauh, kekurangan fasilitas pendidikan, dan ketimpangan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan program yang meningkatkan akses ke pendidikan, dan lembaga pendidikan, termasuk sekolah dan tenaga pendidik, bertanggung jawab untuk membuat lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi (Srivastava et al., 2022).

Kebijakan pemerintah juga berfokus pada penyediaan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Pemerintah menyediakan pendidikan dasar di daerah yang sangat membutuhkan dan membangun dan

merenovasi sekolah karena banyak daerah terpencil memiliki infrastruktur pendidikan yang terbatas. Sekolah Tanpa Tembok dan Sekolah Sehat, yang menawarkan fasilitas kesehatan di sekolah terpencil, adalah solusi inovatif untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah yang sulit dijangkau. Pemerintah berusaha untuk mengurangi hambatan fisik yang menghalangi anak-anak di daerah terpencil untuk pergi ke sekolah dengan membangun infrastruktur yang memadai dan meningkatkan kemampuan transportasi (Prema, 2023).

Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menemukan dan mengatasi masalah pendidikan yang spesifik di daerah mereka. Pemerintah daerah lebih memahami situasi sosial dan ekonomi lokal, sehingga mereka dapat membuat kebijakan yang lebih sesuai dan relevan. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mendirikan sekolah di wilayah yang sangat terpencil dan sulit dijangkau serta menyediakan beasiswa bagi siswa yang berprestasi tetapi tidak mampu. Metode ini memungkinkan pemerintah daerah untuk tidak hanya berkonsentrasi pada pembangunan

infrastruktur tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan dapat lebih mendekatkan sekolah dengan komunitas local (Syaifudin Suhri Kasim, 2022).

Lembaga Pendidikan: Pendekatan Kurikulum dan Inovasi

Selain peran pemerintah, lembaga pendidikan, terutama sekolah dan tenaga pendidik, memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di daerah terpencil. Sekolah adalah pusat pelaksanaan kebijakan pendidikan pemerintah, jadi kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan siswa di daerah terpencil.

Penyesuaian kurikulum untuk lebih sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa di daerah tersebut adalah salah satu cara yang dapat digunakan. Misalnya, di daerah yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, kurikulum dapat mencakup keterampilan praktis yang bermanfaat bagi siswa seperti bertani, mengelola sumber daya alam, atau memanfaatkan teknologi pertanian (Zubaidi & Nadifah, 2023). Dengan demikian, pendidikan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga

memberikan nilai tambah yang bermanfaat bagi siswa yang tinggal di wilayah tersebut. Selain itu, program pendidikan berbasis komunitas, yang melibatkan masyarakat dan memanfaatkan potensi lokal, dapat dipertimbangkan (Wei, 2023).

Pendidikan di daerah terpencil sering menghadapi berbagai masalah termasuk akses yang terbatas ke sekolah secara fisik, kekurangan infrastruktur pendidikan yang memadai, dan kekurangan guru yang berkualitas. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka peluang baru untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, terutama melalui penggunaan media pembelajaran jarak jauh seperti online learning dan e-learning..

E-learning dan pembelajaran online memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah yang sulit dijangkau. Melalui platform pembelajaran digital, seperti Google Classroom, Moodle, atau Ruangguru, siswa di wilayah terpencil dapat mengakses materi pelajaran, menonton video pembelajaran, mengikuti kuis, dan berdiskusi secara daring dengan pengajar serta sesama siswa. Siswa tetap dapat memperoleh

pembelajaran berkualitas tinggi dengan perangkat yang terhubung ke internet, meskipun jaringannya terbatas. Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi memungkinkan para guru untuk memberikan feedback dan bantuan secara langsung kepada siswa melalui chat, video call, atau platform lainnya, mengatasi keterbatasan jarak dan waktu (Ardelean, 2023).

Pemerintah dan lembaga pendidikan juga semakin mengakui pentingnya teknologi dalam pendidikan. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan, berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk mendukung akses internet di daerah-daerah terpencil. Program seperti Internet Desa yang disponsori oleh pemerintah bertujuan untuk menyediakan akses internet di daerah yang sulit dijangkau, memungkinkan siswa di pedesaan untuk mengakses pembelajaran jarak jauh. Untuk memastikan bahwa teknologi dapat diakses oleh semua orang, guru harus memberikan siswa perangkat pembelajaran seperti laptop atau tablet (Garlinska et al., 2023). Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan (Tiwari & Garg, 2023) menyatakan bahwa niasatif seperti

Internet Desa sangat penting untuk meningkatkan akses, memungkinkan pembelajaran jarak jauh, dan memastikan bahwa teknologi menguntungkan semua siswa, terutama di daerah kurang mampu.

Meskipun begitu, penggunaan media pembelajaran jarak jauh di daerah terpencil tetap menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan akses internet yang belum merata, kurangnya keterampilan digital di kalangan siswa dan guru, serta hambatan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, selain memfasilitasi akses teknologi, perlu ada pelatihan bagi guru dan siswa mengenai cara memanfaatkan teknologi secara efektif (Made Emi Anggreyani & Kadek Sintya Dewi, 2023). Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur di daerah terpencil agar teknologi dapat diakses dengan lebih optimal.

Masyarakat dan Orang Tua: Dukungan dan Partisipasi

Pelibatan masyarakat dalam program pendidikan berbasis komunitas memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan pengelolaan sumber daya lokal. Pendidikan dapat

disesuaikan dengan kebutuhan khusus daerah dengan melibatkan anggota komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Ini juga membantu mengatasi kesenjangan dalam akses ke pendidikan, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang, di mana pencapaian akademik sering dihambat oleh keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Program berbasis komunitas juga mendorong warga untuk berpartisipasi secara aktif, yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap keberlanjutan pendidikan di lingkungan mereka (Koh Han Wen Kelvin, 2024).

Orang tua adalah yang paling penting dalam mendidik anak. Orang tua memberikan dasar yang sangat penting untuk sikap dan kebiasaan belajar anak sejak usia dini (Ananta et al., 2023). Pola asuh yang mendukung minat dan keinginan anak untuk belajar dapat membantu prestasi akademik mereka. Orang tua yang menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan, seperti dengan mendampingi anak belajar, memberikan dukungan moral, dan menetapkan harapan yang tinggi, akan memperkuat keyakinan anak

terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka (Rakhma, 2023). Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab untuk mendukung pendidikan dengan membiasakan anak dengan rutinitas belajar yang baik, menyediakan waktu untuk membaca, dan menciptakan lingkungan rumah yang mendukung belajar. Untuk memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan selama proses belajar, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sangat penting (Sobri et al., 2022).

Sektor Swasta: Investasi dan Kemitraan

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan perekonomian suatu negara, pendidikan sangat penting. Meskipun pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan pendidikan, sektor swasta juga dapat melakukan banyak hal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). CSR dalam bidang pendidikan mencakup tidak hanya memberikan dana, tetapi juga membangun infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan

akses ke pendidikan, terutama di daerah terpencil (Chopra et al., 2024)

Sektor swasta, terutama perusahaan besar, memiliki sumber daya moneter, teknologi, dan keterampilan yang dapat membantu kemajuan pendidikan. Program tanggung jawab sosial (CSR) yang biasanya dilakukan oleh sektor swasta termasuk membangun fasilitas pendidikan, menyediakan sumber daya dan bahan ajar, dan memberikan pelatihan kepada guru. Selain itu, sektor swasta berpartisipasi dalam memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan menawarkan pelatihan keterampilan kepada siswa yang tinggal di daerah tertinggal. Perusahaan tidak hanya membantu pendidikan formal tetapi juga memberi kesempatan kepada generasi muda untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Wirba, 2024). Dengan demikian, sektor swasta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan dalam Mengatasi Ketimpangan Pendidikan
Tantangan Infrastruktur

Setiap anak berhak atas pendidikan, tetapi mendapatkan pendidikan yang baik masih menjadi masalah besar di daerah terpencil. Untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan pendidikan yang sama, banyak hal yang menghambat, termasuk kekurangan infrastruktur, kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas, dan masalah sosial dan ekonomi. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus sangat memperhatikan masalah ini agar pendidikan lebih merata, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

Keterbatasan aksesibilitas ke sekolah adalah salah satu masalah terbesar bagi pendidikan di daerah terpencil. Sekolah berada jauh dari pemukiman, terutama di daerah pedalaman atau pulau-pulau kecil, dan sulit ditempuh, terutama selama musim hujan. Hal ini menghalangi anak-anak untuk pergi ke sekolah setiap hari, bahkan jika mereka memiliki akses ke sekolah. Keadaan ini menjadi lebih buruk karena keterbatasan transportasi dan infrastruktur jalan yang rusak, yang meningkatkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke sekolah (Sebu, 2023).

Selain itu, fasilitas pendidikan dan lingkungan di daerah terpencil sering kali tidak memadai. Banyak sekolah di daerah ini memiliki bangunan yang tidak layak dan tidak memiliki fasilitas dasar seperti toilet, ruang kelas yang cukup, dan peralatan pendidikan yang memadai. Ini tentu berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan, kenyamanan dan keselamatan siswa. Di beberapa tempat, kekurangan fasilitas ini menyebabkan jumlah siswa yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ruang kelas atau guru yang tersedia. Hal ini juga menyebabkan proses pembelajaran yang tidak optimal (Prema, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Manuputty et al., 2023) mengatakan bahwa bahwa fasilitas sekolah yang tidak memadai di SD Negeri 1 Sabaru, termasuk furnitur yang rusak dan infrastruktur yang tidak memadai, berdampak negatif pada proses pendidikan, kenyamanan siswa, dan hasil belajar, menekankan perlunya peningkatan fasilitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Tantangan Sumber Daya Manusia:

Kekurangan tenaga pendidik berkualitas tinggi merupakan masalah besar di daerah terpencil selain masalah infrastruktur. Banyak sekolah di daerah terpencil kekurangan guru yang berpengalaman, sehingga kualitas pendidikan tidak sebanding dengan di daerah perkotaan. Selain itu, banyak guru yang ditempatkan di daerah terpencil seringkali tidak memiliki pelatihan khusus yang diperlukan untuk mengajar dalam lingkungan dengan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas. Kekurangan guru berkualitas ini seringkali menyebabkan siswa menerima pendidikan berkualitas rendah di daerah tersebut (Shakeel Ahmed, 2023).

Selain itu, guru menghadapi keterbatasan dalam pelatihan dan pengembangan profesional. Banyak guru di daerah terpencil tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengikuti pelatihan, kursus, atau seminar pengembangan profesional yang dapat memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengajar (Miranda, 2023). Meskipun ada beberapa program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah, mereka seringkali tidak

cukup untuk memenuhi kebutuhan semua guru di daerah-daerah yang membutuhkan. Hal ini membuat guru di daerah terpencil sulit untuk mengembangkan dan memperbarui metode pengajaran mereka. Akibatnya, kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa terpengaruh (Cernajeva & Vintere, 2022).

Tantangan Sosial dan Ekonomi

Tantangan sosial dan ekonomi mempengaruhi akses pendidikan di wilayah terpencil. Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah salah satu masalah terbesar. Di banyak daerah, orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, baik untuk biaya sekolah, seragam, buku, maupun transportasi. Di beberapa tempat, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin bahkan dipaksa berhenti sekolah agar orang tua mereka dapat membantu bekerja. Kemiskinan ini menciptakan siklus ketidaksetaraan yang sulit dipecahkan, di mana anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan akan sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan (Utina et al., 2023)

Selain itu, ketidaksetaraan gender dan budaya juga menjadi faktor penghambat bagi anak-anak, terutama perempuan, untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Di beberapa tempat, orang masih menganggap bahwa pendidikan perempuan tidak sepenting pendidikan laki-laki, dan mereka seringkali diberi prioritas untuk membantu pekerjaan rumah tangga atau menikah pada usia dini. Dalam konteks ini, norma sosial dan budaya yang menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang kurang penting bagi perempuan semakin memperburuk ketimpangan dalam akses ke pendidikan (Jamatia, 2023). Meskipun ada kemajuan dalam kesetaraan gender di banyak tempat, di beberapa daerah terpencil kesadaran dan sikap masyarakat tentang pentingnya perempuan mendapatkan pendidikan masih perlu ditingkatkan (Irshad Ahmad Reshi et al., 2022). Studi yang dilakukan (BAKHT JAMAL et al., 2023) juga menyoroti bahwa norma sosial dan sikap budaya di daerah terpencil Pakistan secara signifikan menghambat pendidikan anak perempuan. Kampanye kesadaran yang ditargetkan dan keterlibatan

masyarakat sangat penting untuk menantang keyakinan ini dan mempromosikan pentingnya pendidikan anak perempuan untuk kemajuan masyarakat.

Solusi dan Rekomendasi

Program pendidikan inklusif adalah salah satu kebijakan utama yang digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan. Tujuan program ini adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi setiap anak, tidak peduli latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis mereka. Untuk tujuan ini, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang memberikan prioritas kepada wilayah terpencil dan terisolasi. Salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yang membantu keluarga kurang mampu, terutama di daerah tertinggal, mendapatkan dana untuk pendidikan. Program seperti ini memungkinkan anak-anak di daerah terpencil untuk mendapatkan bantuan untuk membayar biaya kuliah mereka (Ninghardjanti et al., 2023). Terlepas dari masalah ini, PIP merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketidaksetaraan

pendidikan. Namun, untuk memaksimalkan dampak PIP, diperlukan perbaikan berkelanjutan dalam penjangkauan masyarakat dan manajemen data.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Rizky et al., 2023) mengenai program Smart Indonesia, yang menawarkan bantuan pendidikan tunai kepada siswa berusia 6 hingga 21 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini dirancang untuk mengurangi biaya pendidikan dan memastikan bahwa siswa yang layak menerima dukungan, sehingga mengakhiri ketidaksetaraan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga berkonsentrasi pada menyediakan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Meskipun kendala geografis merupakan kendala utama, pembangunan sekolah dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan akses (Ibrahim et al., 2024). Untuk mengatasinya pemerintah berfokus pada penyediaan sarana transportasi untuk anak-anak yang tinggal di daerah yang jauh dari sekolah (Agus et al., 2024). Dengan bantuan transportasi atau program sekolah di rumah untuk

daerah yang sulit dijangkau, diharapkan anak-anak akan lebih mudah mendapatkan pendidikan.

Solusi Infrastruktur

Membangun sistem pendidikan yang mudah diakses dan berbasis teknologi merupakan solusi penting untuk masalah infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Penggunaan teknologi dan desain sekolah yang ramah bagi anak-anak dengan disabilitas dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil (Santamaria-López & Ruiz, 2023). Sekolah berbasis digital atau sekolah yang memiliki e-learning dapat mengurangi kesenjangan akses terhadap materi pembelajaran berkualitas tinggi, meskipun sekolah tersebut berada di wilayah yang terpencil. Siswa dapat menggunakan teknologi untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dan mengakses berbagai sumber daya digital yang membantu mereka belajar. Platform pembelajaran daring juga memungkinkan siswa di daerah terpencil untuk belajar dari guru yang berkualitas tinggi, yang mungkin tidak dapat mereka temui di tempat lain (Natalja Vronska, 2023). Senada dengan hal tersebut, studi yang

dilakukan oleh (Muhammad Tahajjudi Ghifary et al., 2022) menyatakan bahwa materi online secara signifikan mengurangi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil dengan menyediakan akses ke sumber belajar dan guru berkualitas tinggi. Pendekatan digital ini memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran jarak jauh, memastikan mereka mendapat manfaat dari konten pendidikan yang beragam meskipun ada keterbatasan geografis. Aksesibilitas yang memadai juga penting untuk memudahkan akses ke sekolah. Pemerintah atau komunitas lokal dapat bekerja sama untuk menyediakan transportasi yang aman dan terjangkau bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah (Muhaimin et al., 2022). Beberapa daerah telah menerapkan program transportasi gratis untuk anak-anak sekolah, yang mencakup transportasi umum yang murah dan aman serta kendaraan pribadi. Seperti misalnya studi yang dilakukan oleh (Nani & Laksmono, 2023) yang membahas mengenai kebijakan transportasi Jak Lingko di DKI Jakarta bertujuan untuk menyediakan transportasi yang terjangkau dan mudah diakses bagi siswa, mengatasi biaya transportasi

yang tinggi dan meningkatkan mobilitas, sehingga mendukung akses mereka ke pendidikan dan meningkatkan peluang mereka untuk pekerjaan di masa depan.

Solusi Sumber Daya Manusia:

Kekurangan tenaga pengajar adalah masalah besar bagi pendidikan di daerah terpencil. Pelatihan dan sertifikasi guru bersama dengan insentif khusus untuk guru yang mengajar di daerah terpencil adalah solusi yang dapat diterapkan (Fang et al., 2023). (Eddraoui et al., 2023) dalam penelitiannya menekankan perlunya peningkatan program pelatihan guru, termasuk integrasi TPACK, untuk membekali guru dengan keterampilan yang diperlukan. Ini menyarankan peningkatan pelatihan praktis dan dukungan untuk pendidik, yang sejalan dengan mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil melalui persiapan guru yang efektif.

Selain itu, program sertifikasi akan membantu memastikan bahwa guru yang ditempatkan di daerah terpencil memiliki kemampuan yang diperlukan. Insentif seperti tunjangan khusus atau fasilitas perumahan dapat mendorong

pendidik untuk bekerja di wilayah yang sulit dijangkau.

Solusi Sosial dan Ekonomi

Peningkatan beasiswa dan subsidi pendidikan dapat mengatasi masalah kemiskinan yang menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan. Keluarga dapat mendapat manfaat besar dari beasiswa pendidikan, yang dapat diberikan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Beasiswa ini dapat mencakup biaya pendidikan, seragam, buku, dan transportasi, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat belajar tanpa terhambat oleh biaya (Aurellin & Sentosa, 2023).

Selain itu, sangat penting untuk mendorong masyarakat lokal untuk mendukung pendidikan anak-anak. Membangun budaya pendidikan yang mendukung adalah tanggung jawab masyarakat. Program yang melibatkan masyarakat, seperti kelompok belajar komunitas atau pelatihan bagi orang tua, dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pendidikan. Pemberdayaan ini juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan anak-

anak, mengurangi hambatan sosial, dan membuat lingkungan yang mendukung keberhasilan pendidikan anak-anak (Armalia et al., 2023).

Pada akhirnya, solusi kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat pembangunan sekolah di wilayah terpencil. Pembangunan sekolah, perpustakaan, arena olahraga, atau laboratorium digital dapat menjadi bagian dari program kemitraan ini. Dengan kerja sama ini, kedua pihak dapat menggabungkan kemampuan mereka dalam bidang pendanaan, teknologi, dan pengelolaan sumber daya. Sebagai contoh, lembaga teknologi dapat membantu sekolah-sekolah di daerah terpencil dengan memberikan perangkat lunak atau perangkat keras, sementara pemerintah dapat membuat peraturan dan kebijakan yang mendukung. Selain itu, perusahaan juga dapat membantu pendidikan di daerah terpencil dengan menyediakan dana CSR (Corporate Social Responsibility). Banyak perusahaan besar telah mengalokasikan sebagian dari keuntungan CSR mereka untuk program sosial, termasuk pendidikan. Dana CSR ini dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan,

melatih guru, atau memberikan beasiswa kepada siswa yang membutuhkan. Oleh karena itu, sektor swasta tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti misalnya studi yang dilakukan oleh (Mayasari, 2022) menyatakan bahwa program CSR Pertamina mencakup Pilar Cerdas Pertamina untuk pendidikan, yang selaras dengan solusi kolaboratif untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Inisiatif ini mencerminkan komitmen sektor swasta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendanaan dan pengelolaan sumber daya.

E. Kesimpulan

Ketimpangan pendidikan di daerah terpencil di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk infrastruktur yang buruk, kekurangan tenaga pendidik berkualitas, dan masalah sosial serta ekonomi. *Stakeholder*, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta, memiliki peran kunci dalam mengatasi masalah ini.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan program pendidikan inklusif, seperti Program Indonesia Pintar, yang bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara. Lembaga pendidikan harus menyesuaikan kurikulum agar relevan dengan kebutuhan lokal dan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Keterlibatan orang tua dan masyarakat juga sangat penting untuk mendukung pendidikan anak dan mempromosikan budaya pendidikan. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan bagi guru, dan hambatan sosial yang menghalangi partisipasi, terutama bagi perempuan. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan infrastruktur pendidikan, program pelatihan guru, serta beasiswa dan subsidi untuk siswa dari keluarga kurang mampu.

Kolaborasi antara semua pihak adalah kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di daerah terpencil. Dengan tindakan bersama dan komitmen yang kuat, ketimpangan pendidikan ini dapat diatasi, memberikan

kesempatan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A., Hakim, L., Mahsyar, A., & Fatmawati. (2024). Education Policy on Operational Assistance Management at the Local Level: A Challenge and Recommendations. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 121–133. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i2.1116>
- Ananta, V., Krisda, Sumiah, & Kurniawa, W. (2023). Role of Parents In Learning Spirit Early Childhood. *International Journal of Education and Teaching Zone*, 2(2), 332–340. <https://doi.org/10.57092/ijetz.v2i2.82>
- Ardelean, C. (2023). “Remote Teaching: Using Video Resources for Class Interaction.” *Professional Communication and Translation Studies*, 14, 200–206. <https://doi.org/10.59168/zkgd1319>
- Armalia, C. A., Niswanto, N., & Ismail, I. (2023). Management of Providing Scholarships by the Human Resources Development Agency for Educators in Aceh Province, Indonesia. *Path of Science*, 9(2–3), 2023–2027. <https://doi.org/10.22178/pos.90-6>
- Aurellin, D., & Sentosa, S. U. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap APM (Angka Partisipasi Murni) di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 89. <https://doi.org/10.24036/jkep.v5i2.14863>
- BAKHT JAMAL et al. (2023). Addressing Gender Disparities in Education: Empowering Girls Through Education in Pakistan. *Russian Law Journal*, 11(12s), 15–25. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i12s.1997>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*. 9(2), 27-40.
- Cernajeva, S., & Vintere, A. (2022). *SELF-ORGANIZED TEACHERS LEARNING TO*. 2019–2021.

- Chand, D., & Mohan, P. (2019). Impact of school locality on teaching and learning: A qualitative inquiry. *Waikato Journal of Education*, 24(2), 65–72.
<https://doi.org/10.15663/wje.v24i2.672>
- Chen, A. (2024). The Influence of Economic Development on Educational Equity. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 52(1), 225–229.
<https://doi.org/10.54254/2753-7048/52/20241577>
- Chopra, D. A., Modi, D. R. K., & Kumar, D. A. (2024). Integrating Corporate Social Responsibility (CSR) into Business Education: Cultivating Ethical Values and Sustainable Practices. *Educational Administration Theory and Practices*, 30(5), 5737–5744.
<https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.3847>
- Dong, G. (2024). Address Educational Inequality: Current State, Causes, and Strategies. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 29, 266–271.
<https://doi.org/10.54097/2katp774>
- Eddraoui, B., Sukyadi, D., Bukhori Muslim, A., & Musthafa, B. (2023). Revisiting Pre-Service Education for Secondary EFL Teachers in Indonesia. *Language Circle: Journal of Language and Literature*, 17(2), 276–286.
<https://doi.org/10.15294/lc.v17i2.41629>
- Fang, G., Zhou, X., Xin, Y., Li, M., Li, F., Zhang, W., Li, B., & Wang, Y. (2023). Mental Health of Primary and Secondary School Teachers in the Remote Mountain Areas. *Medicina (Lithuania)*, 59(5), 1–9.
<https://doi.org/10.3390/medicina59050971>
- Garlinska, M., Osial, M., Proniewska, K., & Pregowska, A. (2023). The Influence of Emerging Technologies on Distance Education. *Electronics (Switzerland)*, 12(7).
<https://doi.org/10.3390/electronics12071550>
- Hart, C. (1998). *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*.

- Sage Publications. SAGE Community Engagement. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(4), 1–19.
<https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i04.25621>
- Ibrahim, R. A., Sidiq, F., & Vaidyanatahan, S. (2024). Analysis of the Availability and Gaps of Educational Facilities in Teluk Bintuni Regency Papua. *International Journal of Ethno-Sciences and Education Research*, 4(2), 43–48.
<https://doi.org/10.46336/ijeer.v4i2.620>
- Irshad Ahmad Reshi, Dr T. Sudha, & Shabir Ahmad Dar. (2022). Women’s Access to Education and Its Impact on Their Empowerment: A Comprehensive Review. *Morfai Journal*, 1(2), 446–450.
<https://doi.org/10.54443/morfai.v1i2.760>
- Jamatia, P. L. (2023). The Impact of Parental Economic Challenges on Women’s Education in India. *Journal of Women Empowerment and Studies*, 35, 10–19.
<https://doi.org/10.55529/jwes.35.10.19>
- Koh Han Wen Kelvin. (2024). Enhancing Sustainable Development Through Community Engagement. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(4), 1–19.
<https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i04.25621>
- Made Emi Anggreyani, & Kadek Sintya Dewi. (2023). Students’ Perception of Supporting Factors during Remote English Teaching. *International Journal of Language and Literature*, 7(1), 33–43.
<https://doi.org/10.23887/ijll.v7i1.60687>
- Manuputty, R. J., Penti, P., Agustina, M., Anjelia, N., & Rinie, R. (2023). Availability of Facilities Supports Education Across All School Levels: Case Study of SDN 1 Sabaru. *Journal of Instructional and Development Researches*, 3(3), 86–100.
<https://doi.org/10.53621/jider.v3i3.228>
- Mayasari, S. (2022). Implementasi Corporate Social Responsibility Pt. *Jurnal Akrab Juara*, 7(4), 193–207.
- Miranda, G. dos S. S. (2023). Emergency remote learning and TDIC’s during the COVID-19
-

- pandemic: Impulses and obstacles. *Emergency Remote Learning and TDIC's during the COVID-19 Pandemic: Impulses and Obstacles.* <https://doi.org/10.56238/emerrrelcovid19-001> 2(8), 2239–2248. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i8.454>
- Muhaimin, A. A., Gamal, A., Setianto, M. A. S., & Larasati, W. L. (2022). The spatial justice of school distribution in Jakarta. *Heliyon*, 8(11), e11369. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11369>
- Muhammad Tahajjudi Ghifary, Suryanto, Sri Iswati, Suwarni, & Bambang Purwoko. (2022). The Efforts to Improve Student Learning Outcomes with an Online Material Solution in School Classes in Rural Indonesia. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 7(1), 355–367. <https://doi.org/10.25217/ji.v7i1.1710>
- Nani, S., & Laksmono, B. S. (2023). The Implementation of Transportation Inclusion as a Social Welfare Policy Supporting Students Mobility. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(8), 2239–2248. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i8.454>
- Natalja Vronska, J. S. (2023). Developing a Digital Strategy for the Digitalization and Implementation of Remote and Combined Training in Restoration and Construction. *Rural Environment. Education. Personality. (REEP) Proceedings of the 16th International Scientific Conference*, 16(May), 47–55. <https://doi.org/10.22616/reep.2023.16.005>
- Ninghardjanti, P., Murtini, W., Hindrayani, A., & Sangka, K. B. (2023). Evaluation of the Smart Indonesia Program as a Policy to Improve Equality in Education. *Sustainability (Switzerland)*, 15(6). <https://doi.org/10.3390/su15065114>
- Prema, N. (2023). Legal Problems of Education Equality in Remote Areas. *NOMOI Law Review*, 4(1), 101–111. <https://doi.org/10.30596/nomoi.v4i1.14942>
- Rakhma, D. (2023). Parents

- Education Style In Shaping Children's Social Behavior In The School Environment. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(1), 21–30. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i1.577>
- Rizky, R., Hakim, Z., S, S., Sugiarto, A., & Pratama, A. G. (2023). Implementasi Metode Simple Additive Weighting Program Penerima Bantuan Indonesia Pintar di SMA 6 Pandeglang. *Explore: Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika*, 14(1), 32. <https://doi.org/10.36448/jsit.v14i1.3006>
- Santamaria-López, T. M., & Ruiz, V. G. (2023). Distance Education for children with a disability and/or from vulnerable families. *Education and Information Technologies*, 28(5), 5297–5312. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11347-3>
- Sebu, S. (2023). Access to Quality Education, a Basic Right of Every Child. *Journal of Education, Society and Behavioural Science*, 36(7), 41–46. <https://doi.org/10.9734/jesbs/2023/v36i71234>
- Shakeel Ahmed, M. A. B. and H. K. (2023). Influence of Teacher Factors on “Quality Education” in Government Primary Schools in the Naseerabad Division, Balochistan, Pakistan. *Annals of Human and Social Sciences*, Vol 4(2), 626–637. [http://doi.org/10.35484/ahss.2023\(4-II\)57](http://doi.org/10.35484/ahss.2023(4-II)57)
- Sobri, M. N. N. A., Soh, N. F. A. C., & Roziman, N. A. L. M. (2022). The Importance of Parental Involvement in Early Childhood Education for Children Under 4-Year Old. *Journal of Education and Literacy Studies (JELS)*, 1(1), 13–20. <https://doi.org/10.37698/jels.v1i1.104>
- Srivastava, A., Agarwal, S., & Ganapathy, M. (2022). Editorial: Inclusive higher education in cross-cultural settings. *International Journal of Educational Management*, 36(4), 357–363. <https://doi.org/10.1108/IJEM-05-2022-589>
- Sugitanata, A. (2023). SETARA:

- Jurnal Studi Gender dan Anak. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 72–84. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/5463%0Ahttps://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/download/5463/3146>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. ALFABETA Bandung.
- Syaifudin Suhri Kasim. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pendidikan Pada Daerah Kepulauan Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 5(4), 978–994. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.44>
- Tiwari, S., & Garg, R. J. (2023). Technological Impact of Online and Offline Teaching in Indian Context. *VEETHIKA-An International Interdisciplinary Research Journal*, 9(1), 12–16. <https://doi.org/10.48001/veethika.2023.09.01.003>
- Utina, S. S., , Ramoend Manahung, & Wantu, H. M. (2023). Challenges and Opportunities for Children’s Education in the Era of Globalization. *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(06), 3381–3388. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i6-22>
- Wei, Y. (2023). The study of higher education policy in remote rural areas of Australia—what can China learn. *International Journal of Chinese Education*, 12(2), 1–25. <https://doi.org/10.1177/2212585X231179725>
- Wirba, A. V. (2024). Corporate Social Responsibility (CSR): The Role of Government in promoting CSR. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(2), 7428–7454. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01185-0>
- Zubaidi, A., & Nadifah, S. A. (2023). Implementation of Community-Based Education in Increasing Learning Interest of Marginalized Children in School. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 14(02), 150–161.

<https://doi.org/10.58223/syaikhun>

a.v14i02.7116